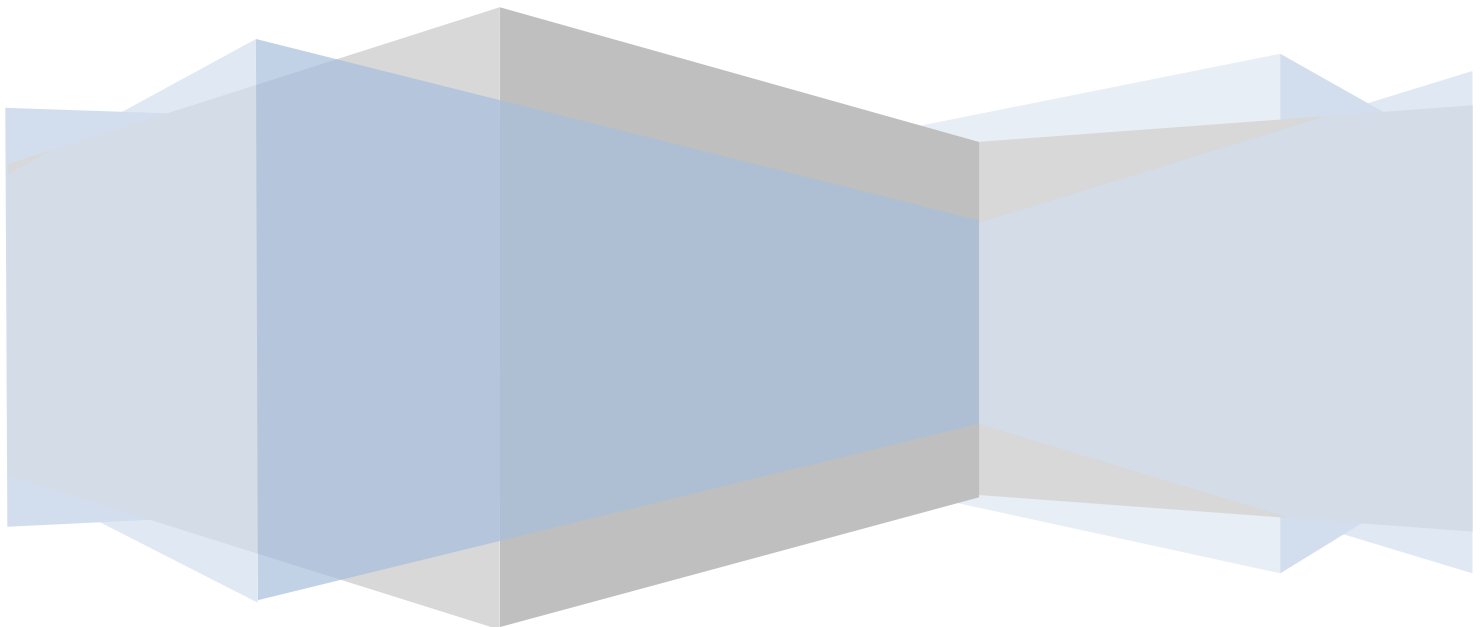




RENCANA KERJA TAHUN 2023

**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan. Rancangan Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah tahun 2023.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Semoga segala daya dan upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan perlindungan dan ridha Allah SWT.

Mamuju, 2022

Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Barat,

Dr. Yakub F. Solon, SH, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19651005 198812 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	6
I.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah...	8
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
III.3. Program dan Kegiatan	38
BAB IV : PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja PD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah, diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pemikiran di atas maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2022 menyusun Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023. Renja PD merupakan dokumen Rencana Pembangunan PD jangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mencapai tujuan dalam Rencana Strategis BPSDM Tahun 2023-2026 serta mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yaitu :

“Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa”.

Dengan sasaran strategis ke-11 yaitu :

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing”.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023.

I.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja BPSDM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor)

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2023;
2. Sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD ditahun selanjutnya.

Adapun tujuan dari Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah;

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2023;
3. Meningkatnya capaian target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Renja PD Tahun Anggaran 2023, mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan Renja PD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 dan Tahun 2022 (Triwulan I) Provinsi Sulawesi Barat pada tabel II.1.

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun Berjalan Tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Target RKPd Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
	Badan Pengembangan SDM										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100	100	80	100,00	125,00	100,00	100	100,00	BPSDM
		Nilai SAKIP Lingkup SKPD	65	54	65	69,87	107,49	70	-	-	BPSDM
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup SKPD	95	97,52	95	98,32	103,49	95	34,80	36,63	BPSDM
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	70	54	80	69,87	87,34	70	-	-	BPSDM
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	30	24	6	6	100,00	2	2	6,67	BPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Target RKPD Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	10	8	2	2	100,00	3	1	10,00	BPSDM
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	15	12	3	3	100,00	-	-	-	BPSDM
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	95	97,52	90	98,32	109,24	95	34,80	36,63	BPSDM
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	45	41	41	41	100,00	45	42	93,33	BPSDM
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan	60	48	12	12	100,00	-	-	-	BPSDM
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun	5	4	1	1	100,00	1	1	20,00	BPSDM
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan	500	400	100	100	100,00	-	-	-	BPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Target RKPD Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70	56	14	14	100,00	-	-	-	BPSDM
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	90	90	90	100,00	100	100	100,00	BPSDM
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135	108	27	27	100,00	27	6	4,44	BPSDM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100,00	100			BPSDM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75	60	15	15	100,00	15	15	12,67	BPSDM
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25	20	5	5	100,00	3	3	12,00	BPSDM
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75	60	15	15	100,00	15	10	13,33	BPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Target RKPD Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak	75	60	15	15	100,00	397	130		BPSDM
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	60	48	12	12	100,00	12	12	4,12	BPSDM
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah	485	388	97	97	100,00	97	60	12,37	BPSDM
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	25	4	1	1	100,00	-	-	-	BPSDM
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	25	4	1	1	100,00	-	-	-	BPSDM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100	100	80	80	100,00	100	100	16,67	BPSDM
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	100	400	100	100	100,00	100	40	40,00	BPSDM
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	15	12	3	3	100,00	3	3	20,00	BPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Target RKPD Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan	175	140	35	35	100,00	-	-	-	BPSDM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	175	140	35	35	100,00	35	35	20,00	BPSDM
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan	175	140	35	35	100,00	35	35	20,00	BPSDM
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase (%) ASN yang mengikuti pelatihan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam setahun	13	1,47	7	11,30	161,43	5,50	-	-	BPSDM
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, inti dan Pilihan bagi Aparatur	600	532	80	80	100,00	40	-	-	BPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Target RKPD Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum bagi jabatan administrasi	600	532	80	321	401,25	40	-	15,20	BPSDM
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	500	433	289	288	99,65	227	153	30,60	BPSDM
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	100	30	60	59	98,33	20	-	-	BPSDM
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang	5	400	1	1	100,00	1	1	20,00	BPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Target RKPD Tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga	10	400	2	2	100,00	6	1	10,00	BPSDM
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi bagi Kepemimpinan dan Prajabatan.	500	433	289	288	99,65	227	153	30,60	BPSDM

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79); dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang menjelaskan tentang tugas pokok Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat yaitu melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan Teknis, Rencana dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi;
- b. penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan Administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas, maka untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Sulawesi Barat, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup OPD;
2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam setahun;
3. Persentase ASN yang mendapatkan sertifikasi kompetensi oleh BPSDM;
4. Persentase Peningkatan Akreditasi Lembaga Pelatihan BPSDM;
5. Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan BPSDM.

Dari Indikator Kinerja diatas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatur melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada aparatur sehingga apa yang dicita-citakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang Pengembangan SDM dapat terwujud.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.

Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Belum tersedianya gedung Pusdiklat yang representatif;
2. Jumlah Akreditasi Penyelenggaraan Program Pelatihan yang masih terbatas;
3. Belum terakreditasi dan terstandarisasinya mekanisme / sistem pelaporan data dan informasi Kediklatan di Sulawesi Barat dan masih bersifat sektoral;
4. Belum maksimalnya jumlah tenaga Widyaiswara;
5. Belum memadainya dukungan anggaran BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN;
6. Belum tersedianya pedoman dan dokumen penyelenggaraan kegiatan pengembangan SDM yang memadai;

7. Belum maksimalnya fungsi Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) di Provinsi Sulawesi Barat;
8. Belum maksimalnya kompetensi sumberdaya manusia bidang Penyelenggaraan Kediklatan di Provinsi Sulawesi Barat;
9. Belum maksimalnya sinergitas Penyelenggaraan Pengembangan SDM antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi di Sulawesi Barat;
10. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur

Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen Pengembangan SDM adalah:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara Lingkup BPSDM;
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN/Non ASN untuk perwujudan Pemerintahan yang terpercaya; dan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Internal SKPD.

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Pemenuhan hak ASN untuk mengikuti pelatihan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam setahun;
2. Pelaksanaan uji kompetensi bagi ASN dalam rangka sertifikasi kompetensi;
3. Peningkatan Akreditasi Lembaga Pelatihan BPSDM;
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan BPSDM.

Sedangkan kebijakan yang diambil guna mendukung strategi tersebut adalah:

1. Melakukan Pemenuhan hak ASN untuk mengikuti pelatihan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam setahun;
2. Melaksanakan uji kompetensi bagi ASN dalam rangka sertifikasi kompetensi;
3. Meningkatkan kompetensi Aparatur BPSDM;
4. Melakukan penataan administrasi pelaksanaan pelatihan;
5. Melengkapi sarana dan prasarana berdasarkan skala prioritas;
6. Meningkatkan kompetensi Aparatur BPSDM;
7. Melakukan penataan administrasi pelaksanaan pelatihan;
8. Melengkapi sarana dan prasarana berdasarkan skala prioritas.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Barat**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALISIS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.669.000.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				7.079.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Lingkup BPSDM	70	5.591.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Lingkup BPSDM	70	6.001.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	28,3 Poin	14.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	28,3 Poin	14.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	3 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	3 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	2 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	2 Laporan	2.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4 Laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4 Laporan	2.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALISIS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	99 Persen	5.033.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	99 Persen	5.033.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	5.019.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	5.019.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALISIS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD	100 Persen	20.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD	100 Persen	20.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	10.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	10.000.000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.000.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.000.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.000.000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALISIS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangagn Retribusi Daerah, serta Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.000.000	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangagn Retribusi Daerah, serta Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.000.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2 laporan	2.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2 laporan	2.000.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.000.000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	100 Persen	76.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	100 Persen	292.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	62 paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	62 paket	31.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALISIS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya	100 Persen	5.000.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya	100 Persen	5.000.000	
	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	100 Orang	5.000.000	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	2 Orang	5.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	205.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	20.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	40 Orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	40 Orang	20.000.000	
			Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	100 Persen					Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan		100 Persen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	100 Persen	98.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	100 Persen	262.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	50.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Jenis	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Jenis	15.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALISIS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Jenis	5.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Jenis	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang yang Dicitak	2 Jenis	5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang yang Dicitak	2 Jenis	5.000.000	
			Jumlah Barang yang Digandakan	2 Jenis					Jumlah Barang yang Digandakan		2 Jenis
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Jenis	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Jenis	5.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	20 Jenis	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	20 Jenis	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	150.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	65.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	55.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	2 Unit	15.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	2 Unit	15.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	2 Jenis	15.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	2 Jenis	15.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	1 Unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	1 Unit	5.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALISIS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	2 Jenis	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	2 Jenis	10.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	2 Jenis	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	2 Jenis	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	85.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	125.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	100 Persen	50.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	100 Persen	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	4 Jenis	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	4 Jenis	70.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah PNS yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	43 Orang	5.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah PNS yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	43 Orang	5.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	190.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	190.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan	2 Jenis	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan	2 Jenis	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	50.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALISIS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan	3 Jenis	5.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan	3 Jenis	5.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Jenis	90.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Jenis	90.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	3 Jenis	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	3 Jenis	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Jenis	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Jenis	10.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	10 Poin	1.078.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	10 Poin	1.078.000.000	
	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	120 Orang	420.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	120 Orang	420.000.000	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Teknis Umum, inti dan Pilihan bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Teknis Umum, inti dan Pilihan bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALISIS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	350.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	350.000.000	
	Pembinaan, Pengekoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	50.000.000	Pembinaan, Pengekoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	50.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALISIS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi		658.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi		658.000.000	
Jumlah Akreditasi selaku penyelenggara pengembangan kompetensi				Jumlah Akreditasi selaku penyelenggara pengembangan kompetensi							
Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional				Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional							
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional yang disusun	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional yang disusun	1 Dokumen	10.000.000	
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	10.000.000	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	10.000.000	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	20 Orang	90.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	20 Orang	90.000.000	
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan	100.000.000	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan	100.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CAT. ANALISIS
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	5 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	5 Dokumen	10.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	200 Orang	358.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	200 Orang	358.000.000	
	Pembinaan, Pengekoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Dokumen	80.000.000	Pembinaan, Pengekoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Dokumen	80.000.000	

II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023, terdapat beberapa usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan (pokok-pokok pikiran), namun tidak dapat diakomodir karena bukan kewenangan kami di BPSDM dan tidak sesuai dengan arah kebijakan dalam Renstra melalui program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah cerminan dari upaya merealisasikan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 serta mencerminkan bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026. Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan

Disisi lain, Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Dalam hal ini program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026, disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan strategis berdasarkan Rencana

Strategis terhadap 3 (tiga) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

1.1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki *visi* “**Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani**” dan *misi* “**Penggerak Utama Reformasi Birokrasi**”. Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*)
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

1.2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah ***“Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”***.

1.3.

Sedangkan misinya adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- d. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi dan peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, mempedomani pembinaan

pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

1.3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi ***“Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Yang Profesional dan Berkesinambungan”*** yang dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu:

- a. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga kediklatan;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 3 (tiga) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. Meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia aparatur pemerintah;

- c. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah secara bertahap;
- d. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi;
- e. Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai otonomi daerah menyiapkan peraturan - peraturan maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan aparatur;

2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 2023

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai BPSDM Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur

Sasaran yang ingin dicapai BPSDM Provinsi Sulawesi Barat pada RENJA Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPSDM dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPSDM
2. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Aparatur dengan indikator kinerja Nilai Indeks Profesionalitas ASN

3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Adapun rincian rencana kegiatan perprogram serta indikator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 sebagai terlihat pada tabel berikut :

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,033,000,000						5,082,000,000		
5 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/ Bulan	5,019,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		43 Orang/ Bulan	5,070,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Dokumen	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Dokumen	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Dokumen	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Laporan	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Dokumen	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		14 Laporan	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Dokumen	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						20,000,000						20,000,000		

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Dokumen	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		6 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Laporan	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Laporan	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Laporan	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Dokumen	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10,000,000							10,000,000	
5 04 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Dokumen	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Dokumen	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				2 Laporan	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		2 Laporan	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.04.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	2.000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	1 Dokumen	2.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	2.000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	1 Laporan	2.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						76,000,000						86,000,000		
5.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				62 Paket	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	62 Paket	20,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	1 Dokumen	2.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	1 Dokumen	2.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	1 Dokumen	2.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya				100 Persen	5.000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	100 Persen	5.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				100 Orang	5.000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	100 Orang	5.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				41 Orang	20.000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	41 Orang	20.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang undangan				100 Persen	10.000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	100 Persen	10.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.04.01.105.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 orang 100 Persen	20.000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		40 orang 100 Persen	20.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah						98.000,000							98.000,000	
5.04.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5.000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		10 Paket	5.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan				3 Jenis	15.000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		3 Jenis	15.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Jenis	6.000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		3 Jenis	6.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Jenis	5.000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		4 Jenis	5.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak Jumlah Barang yang Digandakan				2 Jenis 2 Jenis	5.000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		2 Jenis 2 Jenis	5.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Jenis	5.000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		5 Jenis	5.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				20 Jenis	15.000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		20 Jenis	15.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	40.000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		20 Laporan	40.000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 04 01 106 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Dokumen	2,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						65,000,000							50,000,000	
5 04 01 107 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		2 Unit	15,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 107 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				2 Jenis	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		2 Jenis	15,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 107 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Unit	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 107 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				2 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		2 Jenis	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 107 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				2 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		2 Jenis	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						85,000,000							85,000,000	
5 04 01 108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		100 Persen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				4 Jenis	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		4 Jenis	30,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 108 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PNS yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan				43 orang	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		43 orang	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah						190,000,000						100,000,000		
5 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan				2 Jenis	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		2 Jenis	15,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	50,000,000		Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		31 Unit	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan				3 Jenis	5,000,000		Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		3 Jenis	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3 Jenis	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		3 Jenis	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor				1 Jenis	90,000,000		Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		1 Jenis	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor				3 Jenis	10,000,000		Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		3 Jenis	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor				3 Jenis	10,000,000		Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA		3 Jenis	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						1,078,000,000							638,000,000	
5 04 02 1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						420,000,000							270,000,000	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.04.02.1.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERMBAWA	1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERMBAWA	1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				120 Orang	350,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERMBAWA	120 Orang	200,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERMBAWA	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						658,000,000						368,000,000		
5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	1 Dokumen	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 02 1.02 02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	1 Dokumen	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 02 1.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				20 Orang	90,000,000	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	20 Orang	53,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 02 1.02 04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				3 Laporan	100,000,000	Kab Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	3 Laporan	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 02 1.02 05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				5 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	5 Dokumen	5,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 02 1.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				200 Orang	358,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA	200 Orang	200,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2023 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Barat,

Dr. Yakub F. Solon, SH,M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19651005 198812 1 002